

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Desta Dwihartanto¹Wawan Gunawan²Zaenal Abidin³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

rildesta_130906@yahoo.com

Abstrak

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang didominasi oleh pegunungan sehingga banyak wilayah yang berada pada kemiringan lereng sangat curam. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya peristiwa tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya merespon kejadian bencana tanah longsor tersebut. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki kebijakan yang spesifik untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi untuk menganalisis data yang diperoleh melalui survey serta melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah membawa pengaruh signifikan terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dimensi komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan pelaksana dan struktur birokrasi memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Hasil koefisien determinasi dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan variabel implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini mempengaruhi variabel efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor sebesar 66.91%,

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

sedangkan sisanya sebesar 33.09% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan analisis kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Sugiyono (2019: 6), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan peneliti ini menggunakan metode penelitian tersebut adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat mendeskripsikan pengaruh antara variabel bebas yaitu implementasi kebijakan pemerintah (X) dan variabel terikat efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat (Y).

Secara konseptual teori-teori yang digunakan akan diaplikasikan pada objek dan subjek penelitian untuk menjawab seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dunn (2003:51) mengungkapkan bahwa : "Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai Lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis deskriptif implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pengukuran empat dimensi komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan sikap pelaksana, dan struktur kebijakan termasuk dalam kategori **Cukup**, dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 60.95% (52.01% - 68.00%). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penilaian masyarakat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat tanggapan responden dengan persentase skor tertinggi sebesar 66.70% pada dimensi kecenderungan pelaksana kebijakan, sedangkan tanggapan responden dengan persentase terendah adalah sebesar 59.32% pada dimensi sumber-sumber.

2. Analisis deskriptif efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pengukuran tiga dimensi manajemen yaitu pra bencana, tahapan saat kejadian bencana dan pasca bencana termasuk dalam kategori **Cukup**, dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 62.59% (52.01% - 68.00%). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penilaian masyarakat terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat tanggapan responden dengan persentase skor tertinggi sebesar 65.79% pada dimensi pasca bencana, sedangkan tanggapan responden dengan persentase terendah adalah sebesar 57.73% pada dimensi pra bencana.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Efektivitas

Abstract

West Bandung Regency is an area dominated by mountains so that many areas are on very steep slopes. The slope is one of the factors that greatly influences the occurrence of landslides. The West Bandung Regency Government has attempted to respond to the landslide disaster. Since 2013, the West Bandung Regency Government has had a specific policy to organize regional disaster management through West Bandung Regency Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning the Implementation of Regional Disaster Management.

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of the implementation of Regional Government policies on the effectiveness of landslide disaster management in West Bandung Regency. This study uses descriptive analysis methods and regression analysis to analyze data obtained through surveys and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of Regional Government policies has a significant influence on the effectiveness of landslide disaster management in West Bandung Regency. The dimensions of communication, sources, implementing tendencies and bureaucratic structures have a positive impact on increasing the effectiveness of landslide disaster management in West Bandung Regency. The results of the coefficient of determination can be interpreted that the ability of the variable of implementation of the Regional Government policy in this study affects

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

the variable of the effectiveness of landslide disaster management by 66.91%, while the remaining 33.09% is influenced by other variables that were not tested in the study.

The research used in this study is a survey method with quantitative analysis. The research method used in this study is explanatory research. According to Sugiyono (2019: 6), explanatory research is a research method that intends to explain the position of the variables studied and the influence between one variable and another. The reason this researcher uses this research method is to test the proposed hypothesis, so it is expected that this study can describe the influence between the independent variables, namely the implementation of government policies (X) and the dependent variable of the effectiveness of landslide disaster management in West Bandung Regency (Y).

Conceptually, the theories used will be applied to the objects and subjects of research to answer how much influence the implementation of local government policies has on the effectiveness of landslide disaster management in West Bandung Regency. Dunn (2003:51) stated that: "Etymologically, the term policy comes from Greek, Sanskrit, and Latin. The root words in Greek and Sanskrit polis (city-state) and pur (city) were developed in Latin into politia (state) and finally in Middle English policie, which means handling public issues or government administration. The West Bandung Regency Regional Disaster Management Agency as a regional technical institution of the West Bandung Regency Government was formed based on West Bandung Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Amendments to West Bandung Regency Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Formation and Composition of West Bandung Regency Regional Apparatus. The results of the research and discussion show that the implementation of Regional Government policies has a positive and significant effect on the effectiveness of landslide disaster management in West Bandung Regency. The conclusions that can be drawn from this study are:

- 1. Descriptive analysis of the implementation of Regional Government policies based on the measurement of four dimensions of communication, sources, tendencies of implementer attitudes, and policy structures is included in the Sufficient category, with a score of respondent responses of 60.95% (52.01% - 68.00%). Thus, it can be interpreted that the public's assessment of the implementation of Regional Government policies on the implementation of regional disaster management in West Bandung Regency is included in the sufficient predicate. There are respondent responses with the highest percentage score of 66.70% in the dimension of policy implementer tendencies, while the respondent response with the lowest percentage is 59.32% in the source dimension.*

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

2. *Descriptive analysis of the effectiveness of landslide disaster management in West Bandung Regency based on the measurement of three dimensions of management, namely pre-disaster, stages during the disaster and post-disaster, is included in the Sufficient category, with a score of respondent responses of 62.59% (52.01% - 68.00%). Thus, it can be interpreted that the public's assessment of the effectiveness of landslide disaster management in West Bandung Regency is included in the sufficient predicate*

Keywords: *Policy implementation, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan dalam pembangunan berkelanjutan yang saat ini mendapatkan perhatian serius, adalah terkait penanganan kebencanaan. Hampir setiap wilayah, khususnya di Indonesia memiliki potensi bencana. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor geologis, geografis maupun klimatologis di masing-masing wilayah sehingga jenis bencana yang terjadi juga bermacam-macam (Hu et al., 2018: 664-673). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa: “bencana adalah suatu atau beberapa peristiwa yang sifatnya berbahaya, mengancam serta mengganggu segala kehidupan manusianya yang terjadi adanya beberapa faktor yaitu oleh alam maupun non alam atau dari ulah manusia sendiri yang dapat menimbulkan banyak korban, timbulnya kerusakan, menimbulkan banyak kerugian serta memberi efek psikologis yang buruk bagi korban yang mengalaminya”.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka penyelenggaraan penanganan bencana secara lebih lengkap dan kuat. Pemerintah merupakan pelaksana utama dan penyusun kebijakan dalam rangka penanganan bencana. Upaya Pemerintah terkait penanganan kebencanaan, tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB) Tahun 2018. Yakni tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan dan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim. Dengan adanya RAN TPB diharapkan dapat menjadi *guide* pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

rangka mensukseskan TPB, Daerah, dalam hal ini Provinsi beserta Kabupaten/Kota diharapkan juga menyusun dokumen senada.

Salah satu faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah. Selain menampilkan keindahan alamnya, Kabupaten Bandung Barat menyimpan potensi bencana dilihat dari kondisi alamnya. Potensi bencana tersebut diketahui berdasarkan kondisi daerah dan hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Bandung Barat, yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, dan letusan gunungapi. Gambaran potensi bencana di Kabupaten Bandung Barat beberapa dapat dilihat dari sejarah kejadian bencana Kabupaten Bandung Barat dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, hidrologis, sosiologis, serta sumber daya alamnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki risiko bencana tanah longsor yang relatif tinggi karena daerah ini sangat rentan mengalami gerakan tanah, terutama apabila terdapat kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan lereng setempat. Besarnya risiko bencana tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak kerugian, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan, apabila tidak ditindak melalui sikap kesiapsiagaan yang matang.

Namun, tampaknya peristiwa bencana tersebut belum dapat dijadikan suatu bentuk pembelajaran kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serupa yang terjadi pada masa mendatang. Berbagai upaya penanggulangan (mitigasi) bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap warga setempat selama ini dianggap belum efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak bencana tanah longsor yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sebagian besar warga yang terdampak pun dianggap masih belum optimal dalam melakukan mitigasi terhadap bencana tanah longsor setempat. Sementara itu, pengetahuan kebencanaan tanah longsor yang dimiliki warga setempat juga masih sebatas pada pengetahuan terhadap poster tentang kebencanaan tanah longsor yang dibuat oleh pemerintah. Namun demikian, hal tersebut masih belum dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang ideal dalam menghasilkan mitigasi bencana yang efektif. Hal ini

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

ditunjukkan dari banyaknya dampak kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana tanah longsor, masih terus dirasakan warga setempat secara berulang kali, bahkan sampai saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan analisis kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Sugiyono (2019: 6), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan peneliti ini menggunakan metode penelitian tersebut adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat mendeskripsikan pengaruh antara variabel bebas yaitu implementasi kebijakan pemerintah (X) dan variabel terikat efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat (Y).

KERANGKA PEMIKIRAN

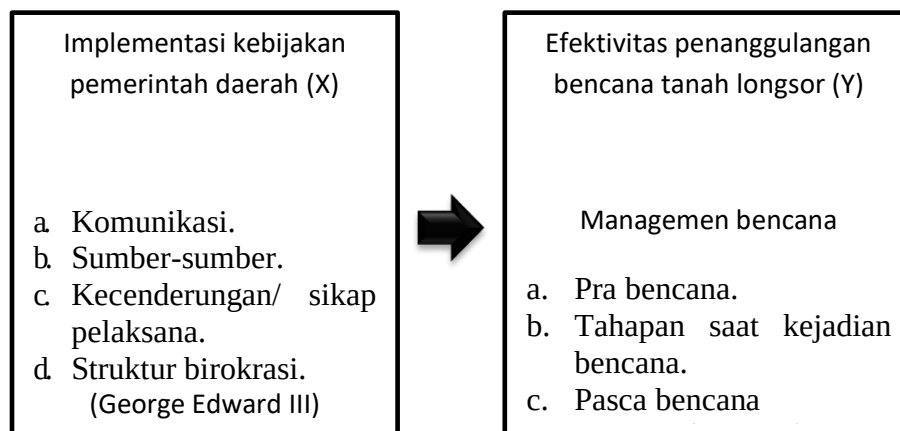
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir menjelaskan pola hubungan antara variabel yang ingin diteliti yaitu hubungan pengaruh antara variabel independen (X) dan dependen (Y). Dalam penelitian ini, variabel independen yang ingin diteliti yaitu empat elemen implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Variabel dependen yang diteliti adalah efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor (Y). Subjek penelitiannya adalah masyarakat rentan bencana di Kabupaten Bandung Barat.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



- a. Variabel Bebas/Independen (X): Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Variabel Terikat/Dependen (Y): Efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor.
- c. : Garis arah pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Secara konseptual teori-teori yang digunakan akan diaplikasikan pada objek dan subjek penelitian untuk menjawab seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat.

Seperti dijelaskan oleh Dunn (2003:51) bahwa : "Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal usul kata *policy* sama dengan dua kata penting lainnya : *policie* dan *politics*" adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Policy*.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Sebagian para ahli menerjemahkan *policy* sebagai kebijaksanaan dan ahli lainnya menerjemahkan sebagai kebijakan. Penggunaan kata kebijakan dan kebijaksanaan seringkali digunakan secara bergantian, sehingga sulit untuk dibedakan pengertiannya. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan istilah kebijakan (*policy*) untuk membedakan dengan istilah kebijaksanaan (*wisdom*) atau kebajikan (*virtue*), selain itu juga istilah kebijakan sesuai dengan kajian kurikulum Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani.

Seperti dinyatakan oleh Islamy (2001:3) bahwa perbedaan istilah kebijakan dan kebijaksanaan yaitu: "Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya, lebih-lebih kita dapat memisahkan kata "*policy*" itu dalam prakteknya ilmu politik, karena pada hakekatnya proses pembuatan kebijakan itu merupakan proses politik".

Dapat peneliti kemukakan beberapa pengertian kebijakan dan kebijaksanaan menurut para ahli, sebagai berikut:

- 1) Tachjan (2006:19) menjelaskan bahwa: "Kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan".
- 2) Carl J. Fridrich (dalam Agustino, 2006:7) kebijakan adalah: "Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) serta kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna untuk mencapai tujuan".
- 3) Hoogerwerf (Alih Bahasa R.L. Tobing, 1983:3-4) menjelaskan bahwa: "Kebijaksanaan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijaksanaan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijaksanaan

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

adalah suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu tindakan yang terarah”.

- 4) James Anderson (dalam Islamy, 2001:17): ”kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan atau dipengaruhi pula oleh proses kebijakan itu sendiri. Menurut Tachjan (2006:21) menjelaskan bahwa: ”Dilihat dari prosesnya, efektivitas kebijakan publik akan ditentukan/dipengaruhi oleh pertama, proses perumusan kebijakannya; kedua oleh proses implementasinya atau pelaksanaannya; dan ketiga, oleh proses evaluasinya. Ketiga tahapan kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausal dan siklikal”.

Dari pendapat-pendapat tersebut, kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah dengan menggunakan serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok dan dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

PEMBAHASAN

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai Lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah. BPBD memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan unsur

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

pendukung Pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat menurut Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Pelaksana.
- 2) Sekretariat:
Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Pelaksana**Tugas:**

melaksanakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan, secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Rincian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan bahan rencana program kerja di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
- c. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;

Sekretariat**Tugas:**

melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Fungsi:

- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

Rincian tugas:

- a. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Unsur Pelaksana dan Sekretariat;

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

- b. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

Subbagian Kepegawaian dan Umum

Tugas:

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.

Fungsi:

- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana
- b. program kerja di bidang kepegawaian dan umum; dan
- c. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.

Rincian Tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
- c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas:

melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis penanggulangan

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Fungsi:

- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkajian bahan rencana program kerja penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkajian bahan bimbingan teknis penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas:

melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Fungsi:

- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

Rincian Tugas:

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**Tugas:**

melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Fungsi:

- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b. pengkajian bahan rencana program kerja penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c. pengkajian bahan bimbingan teknis penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

Karakteristik responden menurut usia

Dari pengambilan sampel usia responden di tiga kecamatan yang menjadi objek penelitian, didapatkan usia termuda dari responden adalah 20 tahun sedangkan usia tertua 68 tahun.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Selanjutnya kisaran usia dibuat interval dengan menggunakan rumus Sturges (Sugiyono, 2017:34): $K = 1 + 3.3 \log (n)$

Keterangan : K = Jumlah kelas

n = jumlah responden

log = logaritma

$K = 1 + 3.3 \log 88 (1.94) = 7.40$ dibulatkan menjadi 7 kelompok usia. Kemudian Jarak usia tertua sampai paling muda di atas dapat diperoleh panjang kelas interval sebagai berikut:

rentang (data terbesar – data terkecil)

$P = \frac{\text{rentang}}{K}$

K

68 - 20

$P = \frac{68 - 20}{7} = 6.85 \approx 7$

7

. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	20 – 26 tahun	8	9.09	9.09
	27 – 33 tahun	11	12.50	12.50
	34 – 40 tahun	14	15.91	15.91
	41 – 47 tahun	23	26.14	26.14
	48 – 54 tahun	19	21.59	21.59
	55 – 61 tahun	8	9.09	9.09
	62 – 68 tahun	5	5.68	5.68
	Total	88	100.00	100.00

Sumber: Olahan Data Primer, 2024

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

3. Analisis deskriptif implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pengukuran empat dimensi komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan sikap pelaksana, dan struktur kebijakan termasuk dalam kategori **Cukup**, dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 60.95% (52.01% - 68.00%). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penilaian masyarakat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat tanggapan responden dengan persentase skor tertinggi sebesar 66.70% pada dimensi kecenderungan pelaksana kebijakan, sedangkan tanggapan responden dengan persentase terendah adalah sebesar 59.32% pada dimensi sumber-sumber.
4. Analisis deskriptif efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pengukuran tiga dimensi manajemen yaitu pra bencana, tahapan saat kejadian bencana dan pasca bencana termasuk dalam kategori **Cukup**, dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 62.59% (52.01% - 68.00%). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penilaian masyarakat terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat tanggapan responden dengan persentase skor tertinggi sebesar 65.79% pada dimensi pasca bencana, sedangkan tanggapan responden dengan persentase terendah adalah sebesar 57.73% pada dimensi pra bencana.
5. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan uji hipotesis nilai t hitung (19.690) > t

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

tabel (1.66277) dan taraf signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, ini berarti hipotesis alternatif (H_a) diterima sedangkan hipotesis nol (H_0) ditolak.

6. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat melalui perhitungan koefisien determinasi adalah sebesar 0.818 atau 66.91%, sehingga sisanya 33.09% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.
7. Peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, sehingga hipotesis penelitian yang peneliti ajukan yaitu: Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan faktor-faktor implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, dan telah teruji secara empirik melalui penelitian di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Astuti, Titin. 2017. Seri Pengetahuan Bencana Tanah Longsor. Jakarta: Mitra Utama.

Christanto Joko. 2011. Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. : Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press

Ella, Yulaelawati And Usman Syihab. 2008. Mencerdasi Bencana : Banjir, Tanah Longsor, Tsunami, Gempa Bumi, Gunung Api, Kebakaran. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hardjito, Dydiet. 1997. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian, Edisi I. Jakarta: Raja Grafindo.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

- Handyaningrat, Soewarno. 1996. Azas-azas Organisasi Manajemen. Jakarta: Mas Agung.
- Hoogerwerf, A (Alih bahasa R.L. Tobing). 1983. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles. O (Ed. Budiman). 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Rajawali Press.
- Lubis, Ibrahim. 1985. Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Nurjanah, dkk. 2012. Manajemen Bencana. Yogyakarta: Alfabeta.
- Pamudji, S. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pabundu Tika, Moh. 2014. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Puturuhi, Ferad. 2015. Mitigasi Bencana dan Pengindraan Jauh. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramli, Soehatman, 2010. Manajemen Bencana, Cetakan Pertama. PT. Dian Rakyat
- Riduwan dan Akdon. 2015. Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2015. Asas-asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2011. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. 1991. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Steers, Richard M. 1999. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Syarifin, Pipin dan Dedeh Jubaedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI.

Ulum, M. Chazienul. 2014. Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif. Malang: UB Press.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wiarto, G. 2017. Tanggap Darurat Bencana Alam. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Medpress.

Yulianto, E. 2011. Understanding the Earthquake Threat to Bandung from the Lembang fault, Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) Project Report. Jakarta.

Jurnal:

Agustina, I.H, Astri Mutia Ekasari, Irland Fardani. 2018. Sistem Ruang Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan, Vol 6 No1. Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains &Teknologi).

Hindersah, H., I.H. Agustina, I. Indratno. 2017. Pembelajaran Tata Bangunan di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Vol 5 No.2 (Juni, 2017) Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi).

Hu, H., Lei, T., Hu, J., Zhang, S., Kavan, P. 2018. Disaster-mitigating and general innovative responses to climate disasters: Evidence from modern and historical China. International Journal of Disaster Risk Reduction 28 (2018).

Dokumen :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: CV. Eko Jaya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Eksemplar Lepas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Eksemplar Lepas.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Eksemplar Lepas.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Eksemplar Lepas.

Permendesa PDTT No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Eksemplar
Lepas.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Eksemplar Lepas.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Eksemplar Lepas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah. Eksemplar Lepas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Desa. Eksemplar Lepas.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Daerah. Eksemplar Lepas.

Web:

<https://www.ayobandung.com/bandung-raja/797941865/20-desa-zona-bahaya-sesar-lembang-di-kbb-didorong-jadi-desa-tangguh-bencana?page=2> (Diakses Tanggal 11 Juli 2024)

<https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buletin%20Info%20Bencana%20Maret%202024.pdf> (Diakses Tanggal 26 Juli 2024).

https://katalog.data.go.id/dataset/daerah-rawan-bencana-tanah-longsor-dan-pergerakan-tanah-di-kabupaten-bandung-barat-tahun-2022/resource/fdf27287-c356-4438-a902-5d8f8d69150c?view_id=45dc6be5-8e74-42cd-8da2-bba5a59846ed (Diakses Tanggal 27 Juli 2024)